



Era Orde Baru Indonesia: Studi Negara Demokrasi “Rasa” Otokrasi

Indonesia's New Order Era: Study of a Democratic State with a "Taste" of Autocracy

Nor Hasan¹, Anas Syariful Anam², Muhammad Aris Hermawan³, Muwahid⁴
¹²³⁴ Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia
hajinorhasan23@gmail.com¹, anastibyan76@gmail.com²,
marisherawan123@gmail.com³, muwahid@uinsby.ac.id⁴

Abstrak

Supersemar menjadi awal mula perpindahan estafet kepemimpinan nasional dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dengan jelas dan tegas mendeklarasikan bahwa demokrasi pancasila harus ditegakkan secara konsekuen. Namun faktanya, demokrasi pancasila yang didengung-dengungkan hanyalah “jargon” belaka. Penelitian ini membahas secara mendalam terkait pemerintahan Orde Baru yang jauh dari ciri – ciri demokrasi yang justru mengarah pada pemerintahan yang otokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu sistem autokrasi beserta implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta disajikan dengan metode deskriptif yang menggambarkan fakta dan fenomena tertentu secara objektif berdasarkan sejarah yang ada dan telah diketahui oleh khalayak umum. Orde baru memiliki semangat untuk menjalankan demokrasi pancasila meskipun pada implementasinya lebih mengarah pada otokrasi dengan menjalankan tata kelola pemerintahannya menggunakan cara – cara yang dikehendaki oleh penguasa dan minim partisipasi masyarakat. Strategi perolehan kekuasaan dan jalannya pemerintahan dijalankan dengan memonopoli struktur militer dan aparatur sipil yang digunakan untuk mencapai tujuan negara yang diyakini kelompoknya saja.

Kata kunci: Orde Baru; Demokrasi; Otokrasi

Abstract

Supersemar was the beginning of the transfer of the national leadership relay from the Old Order government to the New Order government. The New Order government clearly and firmly declared that Pancasila democracy must be enforced consistently. However, in fact, the Pancasila democracy that is being talked about is just "jargon". This research discusses in depth the New Order government which was far from democratic characteristics which actually led to an autocratic government. This research aims to provide an understanding of an autocratic system and its implementation. This research uses a qualitative approach and is presented with a descriptive method that describes certain facts and phenomena objectively based on existing history and is known to the general public. The New Order had the enthusiasm to implement Pancasila democracy even though its implementation was more towards autocracy by carrying out its governance using methods desired by the authorities and minimal public participation. The strategy to gain power and run the government is carried out by monopolizing the military structure and civil apparatus which is used to achieve state goals that are believed by only one's group.

Keywords: New Order; Democracy; Autocracy

I. PENDAHULUAN

Mayjen Basuki Rachmad, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Machmud yang masing-masing memangku jabatan sebagai Menteri Urusan Veteran dan

Demobilisasi, Menteri Perindustrian Dasar, dan Panglima Daerah Militer V/Jakarta Raya merupakan tiga perwira tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang menjadi saksi kunci atas terbitnya Surat Perintah 11 Maret Tahun 1966 (Supersemar) yang ditandatangani oleh Sukarno sebagai Presiden pada saat itu, yang pada intinya memberikan perintah kepada Letjen Suharto yang pada saat itu menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat untuk melakukan 3 (tiga) hal, yaitu : 1) Melakukan semua tindakan yang dibutuhkan untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden dan demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti semua ajaran Pemimpin Besar Revolusi; 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan perintah dengan Panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya; dan 3) Supaya melaporkan semua yang bersangkutan/bersangkut-paut dengan tugas dan tanggungjawabnya (Djamhari et al., 1986).

Supersemar dianggap sebagai awal mula runtuhnya masa kekuasaan orde lama yang dinahkodai oleh Presiden Sukarno (Erlina, 2020) dan sebagai legitimasi politik bagi awal mula masa kekuasaan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto (Mahardika, 2023) yang puncaknya adalah adanya orde baru yang memiliki tekad kuat untuk menghidupkan dan menjalankan Pancasila dan UUD 1945 dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Walaupun pada implementasinya justru tekad itu hanyalah bentuk pengelabuhan saja karena yang terjadi sebenarnya adalah munculnya kekuasaan yang otoriter yang sukses mengarahkan sejarah untuk mendukung langgengnya kekuasaan (Kurniawan, 2014).

Presiden Suharto adalah tokoh yang dianggap memiliki banyak kemampuan, prestasi, dan disorot oleh dunia karena dibawah kepemimpinannya yang otoriter mampu melakukan banyak pembangunan dan swasembada pangan, bahkan pada masa kepemimpinan Presiden Suharto inilah dianggap puncak keemasan produksi hasil pertanian dalam negeri sepanjang sejarah pertanian Republik Indonesia (Riawanti, 2015) serta pemerintahan yang bertahan lama dalam kepemimpinan tertinggi di Republik Indonesia. Presiden Suharto memerankan cara-cara yang bagus dan elegan dengan menggunakan dan melibatkan unsur militer, politik, dan birokrasi untuk mempertahankan eksistensi kekuasaannya tanpa hambatan atau pertentangan dari pihak manapun termasuk oposisinya pada saat itu (Noventari, 2016).

Jalan otoritarianisme seperti yang memang sengaja diambil Presiden Suharto dengan maksud agar memperlancar program-program pembangunan ekonomi. Dalam format ini, stabilitas politik perlu dikendalikan dengan format sentralistik untuk mempermudah pengendalian penyelenggaraan kekuasaan (Yusa' Farchan, 2022). Meski demikian, empat tahun awal pemerintahan Presiden Suharto, kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada seluruh elemen bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, para tokoh sosial kemasyarakatan, baik di daerah ataupun di kota, beserta organisasi sosial politik siap menyambut

Pemilihan Umum (Pemilu) kedua tahun 1971, terciptalah harapan besar untuk berpartisipasi secara langsung dalam pesta demokrasi untuk mendukung agenda-agenda perbaikan pemerintahan baru era Presiden Suharto. Namun model awal pelaksanaan demokrasi itu tidak butuh lama untuk merenggangkan kemesraan pemerintah dengan masyarakat dengan kemenangan Golongan Karya (Golkar) dalam pemilu tahun 1971 dengan perolehan suara sebesar 62,8% (Wahyudi, 2005).

Pemilu tahun 1971 menjadi salah satu agenda politik paling penting untuk awal pemerintahan era Orde Baru dengan tujuan untuk memperoleh legitimasi kekuasaan dengan membentuk Golkar sebagai kendaraan politik utama. Pemerintahan Orde Baru beserta para penyokongnya, lebih-lebih dari kalangan ABRI dengan begitu giat dan sekuat tenaga agar Golkar memenangi persaingan merebut kekuasaan dengan partai politik (parpol) dan organisasi kemasyarakatan peserta pemilu lainnya di Indonesia, seperti Partai Nahdlatul Ulama' (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Nasional Indonesia-Massa Marhaen. Namun, kemenangan Golkar pada pemilu tahun 1971 yang memperoleh angka kemenangan diatas 60% surat suara sah pemilu, sudah menjadikannya sebagai sebuah contoh dan cerminan yang berlanjut pada pemilu-pemilu selanjutnya selama pemerintahan Orde Baru menjalankan roda pemerintahan di Indonesia secara otoriterianisme (Suwirta, 2019).

Orde baru memang seperti menjalankan demokrasi pancasila. Namun KH. Abdur Rahman Wahid (Gus Dur) menyebut demokrasi pada orde baru sebagai "Seakan-akan Demokrasi". Seakan – akan demokrasi yang di dalamnya menutup rapat – rapat unsur-unsur demokrasi. Orde baru menjadikan pancasila sebagai benteng pertahanan untuk mengemas upaya mempertahankan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya sendiri dengan nilai demokrasi pancasila sampai menciptakan otoritarianisme pemaknaan atas pancasila yang pada akhirnya menjadikan pancasila sebagai milik pemerintah seutuhnya dan demokrasipun berubah menjadi formalitas prosedur saja yang bermuara pada kepada satu penguasa mutlak (Fajar & Siregar, MSi., 2021). Salah satu sistem kenegaraan yang dikendalikan atau diatur atau diserahkan kepada satu pengendali (penguasa) atas semua dan/atau setidaknya mayoritas urusan tatanan kenegaraan diserahkan pada satu figur adalah negara dengan sistem autokrasi / otkrasi (Soehino, 2001 : 258).

Kenyataan sejarah mengungkapkan bahwa rezim orde baru mendeklarasikan pempraktekan demokrasi pancasila. Presiden Suharto melaksanakan suatu tata kelola kehidupan yang pada intinya segal aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia harus berideologikan pancasila. Namun, nyatanya semangat ini hanyalah janji dan harapan belaka. Demokrasi pancasila yang didengung-dengungkan mengalami perubahan pada implementasinya, karena pemerintahan Presiden Suharto berubah menjadi

kekuasaan yang “mengekan”, “memaksakan kehendak”, melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan membatasi kebebasan berpendapat. Masukan dan kritikan dari kelompok masyarakat sipil direaksi secara tidak teurukur dan ditanggapi sebagai cara-cara untuk mengkuadeta pemerintahan yang sah (Pakaya & Dali, 2021).

Demokrasi pancasila yang menggema dimana-mana menjadi “kosa kata khusus” atau “ciri khas” dalam sistem pemerintahan orde baru Presiden Suharto, nyatanya hanyalah sebuah demokrasi retorika. Presiden Suharto tidak hanya “memaksakan kehendak sendiri”, namun juga menuju pada pemerintahan yang mengkerdikan bahkan mentiadakan oposisi – oposisi dan/atau sistem *check and balances* melalui cara-cara memperlemah sejumlah lembaga negara dan/atau kelompok masyarakat sipil yang sebenarnya menjadi bagian dari tegaknya demokrasi, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Parpol, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan lembaga-lembaga yudikatif (Nasution, 2007 : 92-93).

Penelitian dengan bahasan orde baru pernah dilakukan, diantaranya oleh Wahyudi yang mengungkapkan tren dan perkembangan positif dengan adanya implementasi demokrasi di era orde baru. Perbaikan struktur sosial, pembangunan, perimbangan / komposisi elit politik, dan transformasi struktural sosial menjadi poin positif yang ditemukan oleh Wahyudi (Wahyudi, 2005). Selain itu, Dwi dan Gayung juga melakukan penelitian terkait gaya dan teknik komunikasi pemerintahan orde baru tahun 1966 sampai dengan tahun 1980 yang mengungkapkan bahwa pemerintahan orde baru pada rentang tahun 1966 sampai dengan tahun 1980 itu sukses mendapatkan pengakuan dari rakyat Indonesia dengan visi misi pembangunan. Rakyat menjadi percaya dan patuh pada kebijakan yang ditempuh, ditetapkan, dan dilaksanakan oleh rezim orde baru (Dwi & Gayung, 2012). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dibahas oleh Wahyui, Dwi, dan Gayung. Penelitian berfokus pada tekad orde baru yang akan menjalankan demokrasi pancasila secara konsisten, namun tekad tersebut disinyalir hanyalah kamufase semata. Gaya kepemimpinan Presiden Suharto memang dikenal berorientasi tujuan, baik dari segi tujuan pengelolaan dan perbaikan proses maupun segi cara untuk mencapai tujuan (Syugiarto & Mangngasing, 2021).

Melalui penulisan penelitian ini, penulis akan mengupas tuntas keberadaan demokrasi pancasila di era pemerintahan orde baru Presiden Suharto dengan tujuan mengetahui kebenaran dan/atau fakta atas implementasi demokrasi pancasila dan deklarasi diri sebagai negara demokrasi atau justru lebih mengarah pada negara otokrasi yang bertameng demokrasi. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu sistem autokrasi beserta implementasinya. Oleh karena itu, semoga penelitian ini bisa memberi sumbangsih positif terhadap pemikiran dan menjadi renungan dalam membuat kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk para pemangku kepentingan pemerintahan di Republik Indonesia ini.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan demokrasi pancasila yang dilakukan di masa orde baru serta disajikan berdasarkan metode deskriptif yang menggambarkan fakta dan fenomena tertentu secara objektif (apa adanya) agar dapat menjelaskan fakta sejarah yang ada berdasarkan data dan/atau informasi yang ada dengan menekankan pada pemahaman yang kuat atas demokrasi yang dijalankan oleh pemerintahan orde baru, namun disinyalir menutup unsur-unsur yang mendukung demokrasi (Purba & Parulian, 2012 : 19). Penelitian ini cocok menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mencapai tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, dependabilitas penelitian ini terpenuhi. Apabila peneliti lain melakukan penelitian pada waktu yang berbeda terkait demokrasi dan otokrasi pada era orde baru dengan metode yang sama, maka akan mengungkapkan hasil penelitian yang konsisten dengan hasil penelitian ini.

Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang ada untuk memverifikasi penelitian yang akan dibahas terkait demokrasi dan otokrasi (Rofiqoh & Zulhawati, 2020 : 23). Objek penelitian yang dibahas adalah masa pemerintahan di era Orde Baru Presiden Suharto yang informasinya diperoleh berdasarkan fakta sejarah yang ada. Hal ini sesuai pula dengan salah satu corak pendekatan kualitatif yang tidak bisa dipisahkan dengan ilmu sejarah (Prayogi, 2021). Peristiwa-peristiwa lampau dan mutakhir terkait masa orde baru memberikan data dan informasi tentang keadaan pada masa itu beserta dengan situasi, kondisi, sistem sosial, ekonomi, politik serta semua fenomena ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Aman, 2011).

Kualitas penelitian ini dijamin dengan cara memastikan kredibilitas atau validitas data yang dipakai dalam penelitian ini (Afiyanti, 2008). Fakta sejarah yang ada pada berbagai literatur terkait orde baru dan fenomena otokrasi yang ada pada era orde baru itu memiliki nilai kredibilitas karena disaksikan dan dirasakan langsung oleh banyak pihak pada saat itu serta menjadi kejadian dan pengetahuan yang diketahui khalayak secara umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Orde Baru adalah salah satu masa pemerintahan yang merupakan tanda bahwa masa pemerintahan Presiden Sukarno telah berakhir dan dimulainya masa pemerintahan Presiden Suharto yang diawali dengan berbagai gejolak nasional seperti Gerakan 30 September 1965, terbitnya Surat Supersemar, demonstrasi mahasiswa yang biasa disebut Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), dan adanya dualisme kepemimpinan nasional dengan adanya kabinet Dwikora dan kabinet Ampera. Goncangan ekonomi, peristiwa politik maupun sosial lainnya juga menjadi awal dimulainya goncangan politik yang disebabkan oleh krisis ekonomi saat itu dengan terjadinya inflasi sebesar 650% yang pada akhirnya

menyebabkan ketidakpercayaan rakyat dan menuntut agar Presiden Sukarno mengakhiri masa kekuasaannya (Wasistiono & Polyando, 2017 : 259).

Pemerintahan Orde Baru di bawah komando Presiden Suharto mampu menjalankan stabilitas politik dalam negeri dengan pemerintahan yang kuat. Stabilitas ini memunculkan ketertarikan asing untuk berinvestasi di Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor lainnya. Pemerintah sepertinya memiliki sudut pandang bahwa stabilitas politik itu hal yang utama untuk memperlancar program-program pembangunan. Oleh karena itu, penataan politik dalam negeri menjadi hal yang penting dalam rangka untuk membangun sistem politik yang berdasarkan pada sentralisasi dengan tujuan agar mempercepat pembangunan ekonomi. Dasar sentralisme inilah yang menyebabkan kekuasaan politik pada masa orde baru bercorak otoritarianisme dalam jangka waktu 32 tahun (Pradana, 2016).

Di awal – awal pemerintahan sebagai presiden kedua di Negara Republik Indonesia, Presiden Suharto dihadapkan pada permasalahan penting berkaitan dengan strategi untuk melahirkan tatanan politik yang akan diterapkan di Indonesia, sehingga dapat menunjang terlaksananya program pembangunan Negara Republik Indonesia. Tatanan politik yang akan tercipta pada saat itu, diupayakan agar mampu terhindar dari persoalan-persoalan politik yang ada dan telah berjalan sebelumnya serta menciptakan dasar keabsahan Dwi Fungsi ABRI (prinsip peran ganda ABRI). Kedudukan ABRI sebagai bagian dari Golkar yang merupakan satu kesatuan militer dan sosial politik menjadikannya sebagai bagian dari kekuasaan negara yang hendak bertransformasi serta berperan sebagai komponen revolusi, demokrasi, dan kekuasaan negara untuk tercapainya masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Konsep / prinsip ini digunakan semasa pemerintahan Presiden Suharto (Richard, 1984 : 35).

Sejak berkuasa, Presiden Suharto berambisi untuk menerapkan Pancasila dan UUD 1945 dengan konsisten, bersikap anti-komunis, serta fokus pada pembangunan, berusaha membentuk sistem pemilu yang dapat memastikan kestabilan pemerintahan. Tanggung jawab utama Presiden Suharto adalah menyelenggarakan pemilihan umum, sesuai dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dalam Ketetapan Nomor XI/MPRS/1966. Setelah dilantik sebagai Presiden, Soeharto tidak segera mengadakan pemilihan umum untuk mengatur pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Menurut TAP MPRS Nomor XI/MPRS/1966, pemilihan umum harus dilaksanakan paling lambat pada tahun 1968. Namun, demi alasan keamanan dan kestabilan politik, pemilihan umum baru bisa diadakan pada tahun 1971. Peserta pemilihan umum ditetapkan oleh presiden melalui Surat Keputusan Presiden No. 23 tanggal 23 Mei 1970. Dalam keputusan tersebut, disetujui sembilan parpol untuk ikut serta dalam pemilu, yaitu NU, Parmusi, PSII, Perti, PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI, serta Golkar. Hasil perolehan suara pemilihan umum 1971 menempatkan Golkar di

posisi pertama dengan perolehan 236 kursi atau 62,82% (Kusumaningrum, 2019).

Pemungutan suara pemilihan umum pertama Orde Baru berhasil dilaksanakan pada 3 Juli 1971. Terdapat 54.749.509 rakyat Indonesia yang telah menyalurkan aspirasinya dalam pemilihan umum ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34.348.673 orang atau sebanyak 62,7% suara diberikan kepada Golongan Karya. Perolehan ini tentunya jauh melampaui jumlah pemilih partai-partai lainnya. PNI memperoleh suara sebanyak 6,9%, Parkindo memperoleh suara sebanyak 1,3%, Murba memperoleh suara sebanyak 0,1%, IPKI memperoleh suara sebanyak 0,7%, Partai Katolik memperoleh suara sebanyak 1,1%, Nahdlatul Ulama berada di posisi kedua perolehan suara sebanyak 18,7%, Permusi memperoleh suara sebanyak 5,4%, PSII memperoleh suara sebanyak 2,4 %, dan Perti memperoleh suara sebanyak 0,7%. Dengan demikian dari 360 jumlah kursi yang diperebutkan, Golongan Karya mendapatkan 236 jumlah kursi, PNI 20 kursi, Parkindo 7 kursi, Partai Katolik 3 kursi, NU 58 kursi, Permusi 24 kursi, PSII 10 kursi dan Perti 2 kursi. Namun, tak sejalan dengan Murba dan IPKI yang tidak mendapat kursi karena kekurangan jumlah pemilih berdasarkan standar Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) (Effendy et al., 2012).

Angka ini jauh melampaui target Golongan Karya yaitu hanya 30 hingga 35 persen suara (Reeve, 2013). Golongan Karya sebagai pendatang baru dalam dunia politik berhasil menang mutlak dalam pemilu ini dengan meraih 236 kursi dari 360 kursi yang diperebutkan. Raihan suara Golkar itu di luar prediksi para peserta Pemilu, terlebih mengingat usia Golkar yang jauh lebih muda dibandingkan dengan umur parpol peserta pemilu lainnya. Golongan Karya berhasil memperoleh mayoritas suara di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan komposisi perimbangan kekuatan yang demikian, Golongan Karya mampu dengan mudah menerapkan kehendaknya di lembaga legislatif, seperti dalam pembuatan undang-undang (UU) maupun melaksanakan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Salah satu strategi politik mayoritas tunggal yang dikejar oleh Golongan Karya, dengan berbagai pendekatan politiknya, telah sukses dicapai (Soemardjan, 2000).

Melihat kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru yang diatur dalam hukum pemilihan umum pada tingkat undang-undang, tampak bahwa kebijakan tersebut tidak selaras dengan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Kemenangan Golkar diraih melalui strategi-strategi politik untuk menarik dukungan suara masyarakat. Kunci keberhasilan Golkar dalam pemilihan umum terletak pada monopoli efektif atas struktur birokrasi sipil dan militer. Strategi politik Golkar, yang dikenal dengan istilah Jalur “ABG” adalah kependekan dari ABRI, Birokrasi, dan Golkar (Sapii et al., 2022).

Mengingat keberadaan “ABG” dalam struktur pemerintahan Orde Baru, tidak mengherankan jika terdapat dominasi kekuasaan politik birokrasi dan militer yang terpusat, sedangkan Golkar berfungsi sebagai “kendaraan politik” Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya melalui partisipasi dalam pemilihan umum. Militer atau ABRI dijadikan sebagai stabilisator, Birokrasi dijadikan

sebagai penggerak karena ABRI memiliki kedisiplinan, kepatuhan, dan kehormatan (Munawir et al., 2024), sedangkan Golkar dijadikan sebagai penjaga dalam jalannya Orde Baru. Ketiga elemen tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan politik nasional Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru.

Strategi tata kelola pemerintahan pada masa orde baru yang memakai jalan “ABG” ini mirip dengan corak yang sama dengan negara otokrasi, yaitu *the rule of a person or a group of persons who arrogate to themselves and monopolize power in the state, exercising it without restraint* (kekuasaan yang dipimpin dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memimpin secara arogan dan memonopoli unsur-unsur kekuasaan dalam negara serta menjalankannya tanpa hambatan) (Barros, 2002 : 11). Kekuasaan dipakai untuk memperlancar agenda-agenda yang diyakini penguasa. Partisipasi masyarakat sangat minim pada masa orde baru. Militer dan aparat sipil memiliki peran dominan atas tata kelola pemerintahan berdasarkan “arahan” dari penguasa.

Otokrasi menggambarkan penggunaan kekuasaan oleh penguasa untuk memperkuat posisi mereka yang sering kali mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi seperti namun tidak terbatas pada menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada sebanyak-banyaknya keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, penerapan hukum yang tidak transparan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan mayoritas aspek kekuasaan dikuasai oleh pihak tertentu. Cara-cara otokratik dikenal sangat arogan dalam memerintah para bawahan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan strategi konsep untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai (Faiq & Ode, 2024). Gaya kepemimpinan ini, Penguasa mempunyai kuasa dalam setiap tata kelola pemerintahan, Aparatur Sipil, Militer, dan mayoritas aspek sosial politik hanya melaksanakan perintah yang diberi oleh Penguasa (Sadapu et al., 2023). Gaya kepemimpinan ini dapat dengan cepat menciptakan dan meningkatkan stabilitas politik, kedisiplinan, pelaksanaan program pemerintah, dan percepatan pembangunan, disisi lain semangat demokrasi pancasila yang sejatinya harus dijalankan hanya menjadi “jargon” (Wahyuni et al., 2022).

IV. KESIMPULAN

Orde baru memiliki semangat untuk menjalankan demokrasi pancasila meskipun pada implementasinya lebih mengarah pada otokrasi dengan menjalankan tata kelola pemerintahannya menggunakan cara – cara yang dikehendaki oleh penguasa dan sangat minim partisipasi rakyat. Strategi perolehan kekuasaan dan jalannya pemerintahan dijalankan dengan memonopoli struktur militer dan aparat sipil. Era masa orde baru memang terdapat banyak partai yang menjadi peserta pemilu, namun perbedaan posisi dalam kekuasaan menyebabkan dominasi partai tertentu menjadi tidak terelakkan karena memang “di-setting” sedemikian rupa untuk mencapai kekuasaan. Penelitian ini hanya berfokus pada sistem pemerintahan era orde baru dengan kurang mempertimbangkan detail peristiwa atau kejadian yang

terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan menambahkan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Y. (2008). Validitas dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2).
- Aman. (2011). DI SEPUTAR SEJARAH DAN PENDIDIKAN SEJARAH. *INFORMASI*, XXXVII(No. 1), 26–41. https://www.researchgate.net/publication/326710022_Di_Seputar_Sejarah_Dan_Pendidikan_Sejarah
- Barros, R. (2002). *Constitutionalism and Dictatorship : Pinochet, The Junta, and the 1980 Constitution*. The Pitt Building, Trumpington Street, Cambridge, United Kingdom.
- Djamhari, S. A., Imran, A., Ariwiadi, Sutanto, S., & Zuhdi, S. (1986). *Sejarah Surat Perintah 11 Maret 1966* (R. Gunawan (ed.)). Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Dwi, H. W., & Gayung, K. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Verleden*, 1(1), 1–109.
- Effendy, B., Thohari, H. Y., Novianto, K., Alfian, M. A., Nubowo, A., & Danial, A. (2012). *Beringin Membangun Sejarah Politik Partai Golkar* (Cet-1). Penerbit Grafindo Khasanah Ilmu.
- Erlina, T. (2020). Peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia Dalam Proses Peralihan Kepemimpinan Nasional Tahun 1965-1968. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 7(2), 95–102. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jwp>
- Faiq, M. A., & Ode, S. (2024). Langkah Taktis Gaya Kepemimpinan Lurah Sunter Jaya Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 1–11. <https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/jipik/index>
- Fajar, A. M., & Siregar, MSi., H. (2021). Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid Tentang Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Communitarian*, 3(1). <https://doi.org/10.56985/jc.v3i1.141>
- Kurniawan, H. (2014). Mengkritisi Sumber Belajar Sejarah Peristiwa 1965 : Antara Kepentingan Politik Dan Ilmiah. *Historia Vitae Seri Pengetahuan Dan Pengajaran Sejarah*, 28(1), 49–69.
- Kusumaningrum, A. (2019). *Awal Orde Baru*. PT. Maraga Borneo Tarigas.
- Mahardika, A. G. (2023). Problematika Yuridis Penerbitan Surat Perintah Sebelas Maret Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, VIII(1), 1–19.
- Munawir, H., Islamy, S. O. La, & Ramadhan, S. (2024). Organizational Behavior Towards Efforts to Reduce Stunting Prevalence in Buton Tengah Regency. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 3(2).

- Nasution, A. B. (2007). *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Tata Negara* (Cet ke-1). Kata Hasta Pustaka.
- Noventari, W. (2016). Kuasa Dibalik Senyum Sang Jendral (Analisis Gaya Kepemimpinan Dan Bagaimana Soeharto Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun). *Jurnal Ilmiah*, 24(2), 33–40.
- Pakaya, S., & Dali, A. (2021). Demokrasi Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia. *At-Tanwir Law Review*, 1(1), 74–95.
- Pradana, H. A. (2016). Persepsi Suharto dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Cina pada Awal Orde Baru. *Indonesian Perspective*, 1(1), 23–42. <https://doi.org/10.14710/ip.v1i1.10427>
- Prayogi, A. (2021). Pendekatan Kualitatif dalam Ilmu Sejarah: Sebuah Telaah Konseptual. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 5(2), 240–254. <https://doi.org/10.15575/hm.v5i2.15050>
- Purba, E. F., & Parulian, S. (2012). *Metode Penelitian* (Cet Ke 2). Percetakan SADIA.
- Reeve, D. (2013). *Golkar: Sejarah Yang Hilang, Akar Pemikiran, dan Dinamika* (Cet. 1). Komunitas Bambu.
- Riawanti, W. (2015). Kajian Peran Elit Politik Dalam Kebijakan Pangan: Jebakan Impor Pangan Pasca Reformasi. *Natapraja*, 3(1). <https://doi.org/10.21831/jnp.v3i1.11956>
- Richard, R. (1984). *Sejarah Politik Orde Baru*. Lembaga Studi Pembangunan.
- Rofiqoh, I., & Zuhawati. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran* (Cet-1). Pustaka Pelajar.
- Sadapu, R., Umuri, H., & Saleh, G. S. (2023). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.59713/jipik.v2i1.310>
- Sapii, R. B. S., Pratama, Y. D., & Aponno, A. D. (2022). Realisasi Wacana Penundaan Pemilu: Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi Dan Demokrasi. *Japhtn-Han*, 1(2). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.48>
- Soehino. (2001). *Ilmu Negara* (Cet-4). Liberty Yogyakarta.
- Soemardjan, S. (2000). *Menuju tata Indonesia baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suwirta, A. (2019). Pers dan Kritik Sosial Pada Masa Orde Baru: Kasus Pemilu 1971 Dalam Pandangan Harian Kompas di Jakarta dan Harian Pikiran Rakyat di Bandung. *SIPATAHOENAN: South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education*, 5(1), 31–52.
- Syugiarto, S., & Mangngasing, N. (2021). Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 29–38. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.26>
- Wahyudi, L. (2005). Demokrasi Orde Baru Sebuah Catatan Bagi Masa Depan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Sosial-Politika*, 6(11), 23–38. https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/jsp_vol6_no11_1jul05_3lutfi (03-14-13-03-03-

12).pdf

- Wahyuni, S., Sukatin, S., Fadilah, I. N., & Astri, W. (2022). Gaya Kepemimpinan Otoriter (Otokratis) Dalam Manajemen Pendidikan. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 123–130. <https://doi.org/10.24252/edu.v1i2.26148>
- Wasistiono, S., & Polyando, P. (2017). *Politik Desentralisasi di Indonesia* (Cetakan Pe). IPDN Press.
- Yusa' Farchan. (2022). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 152–161. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41>